



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 3 No. 1, April 2024, pages: 35-44
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Dusun Ory Pada Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu Kabupaten Maluku Tengah

Mirza Raisa Tuanaya^a, Mike Jurnida Rolobessy^a, Syaiful Rijal Mahulauw^a

Correspondence Email: mirzatuanaya05@gmail.com

Manuscript submitted: 27-04-2024, Manuscript revised: 29-04-2024, Accepted for publication: 02-05-2024

Keyword:

Women's Role 1;
Conflict Resolution 2;
Leadership Structure 3.

Abstract: This research is a qualitative study which aims to find out the role of women in resolving the conflict between Ory Hamlet, Pelauw State and Kariu State. This research was carried out in Ory Hamlet, Pelauw State and Kariu State. Primary data collection techniques were carried out through interviews with a number of informant who were considered to be involved in the process of resolving the conflict between Ory Hamlet, Pelauw State and Kariu State. The results of this research show that so far in conflicts, women and children have only been considered victims, even though the informal efforts made by women have also made a positive contribution to the peacemaking process. However, in formal spaces, women's involvement is very minimal, because they are not in strategic positions in the leadership structure.

Kata Kunci:

Peran Perempuan 1;
Penyelesaian Konflik 2;
Struktur
Kepemimpinan 3.

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui : Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Dusun Ory, Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ory, Negeri Pelauw dan Negeri Kariu. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat dalam proses penyelesaian konflik antara Dusun Ory, Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini dalam suatu konflik, perempuan dan anak-anak hanya dianggap sebagai korban, padahal upaya informal yang dilakukan para perempuan juga memberikan kontribusi positif pada proses terciptanya perdamaian. Namun pada ruang-ruang formal keterlibatan perempuan sangat minim, dikarenakan tidak berada di posisi-posisi strategis yang ada pada struktur kepemimpinan.

^a Universitas Pattimura, Indonesia

1 Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sudah menyadari bahwa konflik sosial adalah permasalahan bangsa. Salah satu komitmen pemerintah untuk menghentikan konflik sosial yang kian hari makin banyak bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, yaitu kemanusiaan; hak asasi manusia; kekeluargaan; kebinekatunggalikaan; keadilan; kesetaraan gender; ketertiban dan kepastian hukum; keberlanjutan; kearifan lokal; tanggung jawab negara; partisipasi; tidak memihak; dan tidak membeda-bedakan. Dari asas-asas tersebut, UU PKS mengharuskan kehadiran negara dalam penanganan konflik sosial. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan konflik dengan memperhatikan kesetaraan gender. Perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan demi terciptanya perdamaian dan keamanan, sehingga mereka lebih rentan terhadap tingkat kekerasan dan represi yang tinggi. Pada 31 Oktober 2000, PBB mengeluarkan Resolusi 1325, yang menyerukan negara anggota untuk mengakui dan mengatasi dampak konflik bersenjata yang sangat besar terhadap Perempuan dan anak Perempuan, Resolusi tersebut membuktikan pentingnya perspekti gender dalam mengatasi dampak konflik yang besar bagi Perempuan dan anak Perempuan, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan berbasis gender terkait konflik, repatriasi dan pemukiman kembali, serta rekonstruksi pasca-konflik dan kebutuhan untuk melibatkan perempuan dan anak perempuan secara bermakna dalam merancang dan membuat solusi yang peka gender. Dua puluh tahun setelah pengesahan Resolusi 1325, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Perempuan terus tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan demi terciptanya perdamaian dan keamanan. Hal ini membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap tingkat kekerasan serta represi yang tinggi. Perempuan juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan paca konflik yang mencakup rekonstruksi, reintegrasi, dan pembangunan kembali.

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa desa di Maluku, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan Masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan lebih disebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat memadai. Permasalahan tapal batas tanah di Indonesia khususnya Maluku tidak bisa di tangani dan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum saja, melainkan dengan pendekatan holistik (komperhensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan ekologi. Konflik yang terjadi Kecamatan Puau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada akhir bulan Januari tepatnya tanggal 25-27 Januari dan melibatkan dua negeri yang saling bertetangga yaitu Negeri Kariuw dan Dusun Ory yang termasuk bagian dari Negeri Pelauw, kemudian bentrokan akan menjalar ke negeri induk Pelauw. Kejadian konflik ini bermula ada salah satu warga Kariuw yang membuka kebun dan ada warga Ory yang menegur, bahwa lahan itu bukan milik Negeri Kariuw. Pada hari Selasa, 25 Januari 2022 pukul 14.30 WIT, terjadi adu mulut terkait lahan tersebut antara beberapa warga setempat. Setelah itu, kedua warga itu kemali ke negeri masing-masing dan melaporkannya ke warga masyarakat, sehingga terjadi konsentrasi masa di perbatasan kedua negeri.

Akibat konflik antara warga Ory, Pelauw dengan Kariuw menyebabkan tiga orang meninggal dunia, empat warga terluka dan satu aparat kepolisian mengalami luka tembak oleh orang tidak dikenal. Beberapa warga Kariuw juga mengungsi ke hutan dan ratusan lainnya mengungsi ke Negeri Aboru yang bersaudara gandong dengan Kariuw. Sebanyak 257 unit rumah warga Kariuw mengalami kerusakan saat konflik dengan Pelauw dan Ory. Berdasarkan data Polda Maluku, 183 di antaranya mengalami rusak berat dan lainnya rusak ringan. Bangunan SD Negeri Kariuw juga termasuk di antara bangunan yang rusak. Kendaraan juga dirusak dalam bentrokan tersebut didalamnya berupa 19 unit motor milik warga, tiga unit motor dinas Polri, satu unit motor dinas TNI, dan Sembilan mobil milik warga.

Pada saat berkonflik, perempuan dan anak-anak mengalami dampak psikis yang luar biasa, baik ketakutan akan suara bom dan senjata maupun rasa cemas yang berlebihan baik dari dusun ory, negeri pelauw dan negeri kariu. Pada saat berkonflik juga anak-anak tidak bersekolah dan menda patkan pendidikan yang semestinya. Masyarakat negeri kariu yang memilih mengungsi di Negeri Aboru sebanyak 1.238 jiwa yang terbagi 358 orang laki-laki, 470 orang perempuan, dan 410 oran anak-anak yang harus menempuh perjalanan kurang lebih 28 jam untuk sampai di lokasi pengungsian Negeri Aboru. Dalam perjalanan menuju lokasi pengungsian mengharuskan mereka untuk meminum air talaga bekas genangan dan memakan makanan seadanya seperti pepaya dan makanan yang ada di hutan, akibatnya ada 2 orang perempuan yang mengidap penyakit kista, 1 dari 2 orang tersebut meninggal dunia. Selain itu, anak-anak dari negeri kariu juga dimutasikan sementara ke SD, SMP dan SMA yang ada di Negeri Aboru untuk sementara, ketika balik dari lokasi pengungsian ke negeri kariu barulah mereka dipindahkan dan disekolahkan di ambon dengan jumlah kurang lebih 100 orang siswa SMP dan SMA karena letak sekolah yang berada di dusun ory (SMP Al-Khairiah) dan sekolah yang berada di perbatasan antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw (SMA N 16 Maluku Tengah) membuat siswa yang berasal dari negeri kariu belum berani pergi ke sekolah karena situasi dan kondisi yang terjadi. Selain korban dari masyarakat negeri kariu, ada juga korban dari Negeri Pelauw beberapa suami yang meninggal dunia dan itu menjadi pukulan telak bagi anak dan istri yang ditinggalkan.

2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyelidiki subjek atau objek tertentu serta memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penulis akan mendeskripsikan fakta dan data tentang, Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Dusun Ory, Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu. Studi *kasus (case studies)* merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Dusun Ory, Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dan turun ke lapangan (Dusun Ory, Negeri Pelauw dan Negeri Kariu) untuk mendapatkan informasi yang terjadi terhadap fenomena-fenomena bagaimana peran perempuan dalam penyelesaian konflik antara Dusun Ory, Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memiliki pemahaman dan mengerti betul tentang permasalahan yang ditemukan peneliti, diantaranya kepala pemerintahan negeri, perempuan usia 18 tahun ke atas, Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat baik di Dusun Ory, Negeri Pelauw dan juga di Negeri Kariu. Dokumentasi yaitu aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Menurut Tung Palan, dimana dokumentasi tersebut berisi data lengkap dan nyata. Salah satu bahan dokumenter adalah foto. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena mampu mengabadikan peristiwa yang terjadi, dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

3 Hasil dan Diskusi

Selama konflik yang terjadi antara Dusun Ory, Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu, perempuan menghadapi tantangan kehidupan. Mereka menjadi pilar kekuatan yang tak tergoyahkan di tengah konflik yang terjadi. Di tengah penderitaan dan kekacauan, perempuan menunjukkan keteguhan, mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman fisik dari konflik, tetapi juga menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Namun, di tengah semua itu mereka menunjukkan ketabahan yang luar biasa dalam mempertahankan keluarga mereka dari konflik yang terjadi. Sejauh ini pemerintah daerah telah mela

kukan upaya untuk penyelesaian konflik tapal batas antara Dusun Ory, Negeri Pelauw dan Negeri Kariu. Dalam upaya penyelesaian konflik tapal batas pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan mediasi terpisah dengan masing-masing negeri dan juga mediasi bersama dengan kedua negeri, adapun pemerintah memfasilitasi dengan menempatkan kepolisian untuk menjaga keamanan pada batas kedua negeri sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik antara Dusun Ory, Negeri Pelauw dan Negeri Kariu. Selain pemerintah, Masyarakat juga memiliki upaya untuk penyelesaian konflik antara kedua negeri tersebut. Perempuan sebagai salah satu kelompok yang sangat rentan akibat adanya konflik juga tentu harus dilibatkan dalam berbagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara Dusun Ory, Negeri Pelauw dan Negeri Kariu baik dalam sektor formal maupun nonformal.

Perempuan sebagai kontributor dalam memberikan Trauma Healing Kepada Korban Konflik khususnya kelompok rentan

Konflik adalah satu hal yang amat ditakutkan oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para Korban bukan hanya dari kalangan laki-laki tetapi kaum perempuan dan anak-anak yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik. Perempuan dan anak, sangat rentan dalam konflik karena dianggap kondisi fisik yang cenderung lemah. Suasana konflik yang penuh dengan jargon-jargon maskulinitas, seperti keberanian, kegagahan, keperkasaan, dan lain-lain, meneggelamkan kaum perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga keberadaannya seringkali diabaikan. Konflik selalu mengorbankan seluruh hak anak-anak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi. Hasil temuan penelitian Gofanda (2022), pengakuan hukum administrasi adat (Gofanda, dkk, 2022), peran pemerintah adat pada penyelesaian konflik (Haji, 2022), ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian konflik adat (Touwe, dkk, 2020), konflik pemilihan kepada desa (Wance, 2019), peran pemerintah negeri (Pelu, dkk, 2023), penyelesaian konflik melalui Saniri Negeri (Tuanaya, dkk, 2022).

Pemerintah Negeri Kariu mencatat data korban pengungsi ke Negeri Aboru berjumlah 1.238 jiwa yang terbagi dalam 358 orang laki-laki, 470 orang perempuan dan 410 orang anak-anak. Begitupun yang terjadi di Negeri Pelauw, para korban yang tewas meninggalkan istri dan juga anak-anaknya, ibu-ibu yang bekerja menumbuk batu di kali serta para jibu-jibu ikan yang ruang geraknya terbatas akibat adanya konflik. Konflik yang terjadi mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak bersekolah semasa konflik berlangsung. Anak-anak dari Negeri Kariu yang mengungsi di Negeri Aboru yang tidak merasakan pendidikan yang prima selama 7 bulan memaksa mereka harus bersekolah di Ambon. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait dampak konflik yang dirasakan perempuan dan anak.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak pejabat kepala pemerintahan negeri kariu

"Kondisi anak-anak dan perempuan sangat terpuruk, bahkan dalam perjalanan 28 jam menuju lokasi pengungsian mengharuskan mereka meminum air telaga bekas genangan dan memakan makanan seadanya seperti pepaya dan makanan lain yang ada di hutan, sehingga ada 2 orang perempuan menderita kista dan satunya meninggal setelah pulang ke negeri kariu. Kemudian dari fasilitas hunian tinggalnya di tenda seperti walang lalu di lokasi yang memang tidak mempunyai fasilitas tempat tidur. Dan akibat konflik ini sangat berdampak terhadap perempuan, khususnya ibu hamil dan baru melahirkan karena memang dalam kondisi dingin dengan fasilitas yang tidak bisa sama sekali. Kemudian anak-anak pada saat berada di lokasi pengungsian mereka dimutasikan pada SD, SMP dan SMA yang ada di negeri aboru, pada saat pemulangan ke negeri kariu ada kurang lebih 100 orang anak yang disekolahkan di ambon khusus bagi badi siswa SMP dan SMA karena letak sekolah yang berada di dusun ory dan negeri pelauw membuat siswa yang berasal dari negeri kariu tidak berani pergi ke sekolah karena situasi dan kondisi yang terjadi"

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu masyarakat Negeri Kariu yang juga seorang perempuan

'Yang jelas perempuan dan anak-anak adalah korban dari semua hal yang terjadi, korban dari dampak konflik kemarin sampai sekarang ini. Bagaimana seorang perempuan harus kuat dalam situasi seperti ini, bagaimana ia dalam status sebagai seorang ibu yang harus membiasakan diri terpisah dari anak-anaknya walau usianya 'dalam pengawasan orang tua' misalnya kemarin anak-anak SMP yang harus dipaksakan keluar sekolah di Ambon dan itu beban dari seorang perempuan di situ, dia harus berbesar hati dengan tetap berpikir positif bahwa ternyata anaknya aman disana'

Wawancara lainnya dilakukan peneliti dengan salah seorang masyarakat dari Negeri Pelauw yang juga seorang perempuan

'Secara kolektif dalam konflik apapun, kelompok yang paling rentan dari adanya konflik adalah perempuan dan sudah pasti, untuk konflik kemarin itu ada perempuan dan anak yang menjadi korban secara psikis maupun fisik. Dimana ada korban yang berjatuh diantaranya itu ada beberapa suami yang meninggal dan itu menjadi pukulan telak bagi anak dan istri yang ditinggalkan'

Wawancara lain dilakukan peneliti dengan salah seorang laki-laki dari dusun ory

'Masyarakat ory yang rentan terhadap konflik itu jibu-jibu ikan yang biasanya berjualan di Negeri Pelauw, tetapi saat konflik itu terjadi ruang gerak mereka terbatas dan hampir 1 bulan itu belum ada aktivitas lalu lalang juga masih diblokir aparat serta masih ada rasa tidak aman untuk menjual ikan mereka'

Selama berada pada daerah pengungsian di Negeri Aboru, masyarakat Negeri Kariu juga banyak mendapatkan banyak bantuan kemanusiaan baik dari Pemerintah maupun LSM yang ada, juga banyak dari pihak perempuan yang terlibat seperti Dinas pemberdayaan Perempuan dan Anak, Polisi Wanita (Polwan), Perkumpulan Perempuan Gereja, serta keterlibatan perempuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan program khusus untuk masyarakat Negeri Kariu yang berada pada daerah pengungsian seperti Dinas Sosial yang menyediakan bantuan makanan, susu untuk anak-anak dan juga lansia. Dinas kesehatan yang menyediakan bantuan obat-obatan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus ibu hamil dan juga lansia, Dinas perdagangan yang memberikan bantuan sembako, serta Badan Penanggulangan Bencana yang menyediakan tenda darurat untuk para pengungsi. Selain memberikan bantuan, ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu trauma healing untuk para kelompok rentan pada konflik dengan tujuan untuk mengatasi gangguan psikologi seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki. Trauma healing ini dilakukan oleh pihak Polisi Wanita (Polwan) dan juga kelompok ibu-ibu Pelwata. Tidak hanya bantuan materil yang diberikan pihak pemerintah tetapi juga bantuan moril dengan memberikan bantuan khusus kepada perempuan dan anak, mendorong pihak perempuan Negeri Kariu untuk proses pendampingan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat.

Perempuan sebagai negosiator dalam penyelesaian konflik dusun ory, negeri pelauw dengan negeri kariuw

Perempuan harus ikut mengambil bagian pada aspek-aspek yang dampaknya secara langsung melibatkan kaum perempuan. Misalnya dalam konteks penyelesaian konflik atau perang. Perempuan secara langsung menerima efek buruk dari konflik jadi sudah sewajarnya jika perempuan juga ikut dilibatkan sebagai aktor-aktor penting yang secara resmi turut serta dalam inisiasi perdamaian dan negosiasi damai serta berkontribusi langsung dalam aktifitas-aktifitas mempertahankan dan menjaga perdamaian. Keyakinan bahwa keterlibatan perempuan dalam negosiasi konflik akan membawa dam

pak berbeda yang lebih positif diyakini karena pertama, secara alami perempuan memang memiliki sifat bawaan yang damai dan mencintai kedamaian. Kedua, perempuan telah melewati proses pembangunan karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada dasarnya, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi gaya negosiasi setiap orang. Di antaranya karakter/sifat/personality, budaya, dan gender. Dalam model negosiasi, perempuan dianggap lebih kooperatif sedangkan laki-laki lebih kompetitif. Menurut Wyatt (1999) perempuan bernegosiasi dengan berlandaskan keadilan bagi kedua belah pihak sedangkan laki-laki bernegosiasi untuk menang (Dobrijevic, 2014). Menurut Lewicki, et al (2010), ada 5 perbedaan dalam model negosiasi berdasarkan gender, yaitu :

- 1) Dalam konteks negosiasi, perempuan lebih fokus pada hubungan sedangkan laki-laki pada tugas.
- 2) Perempuan dan laki-laki memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Laki-laki fokus pada posisi, sedangkan perempuan terfokus pada informasi personal/pribadi dan emosi.
- 3) Ada sebagian fakta lapangan yang membuktikan bahwa perempuan sering diperlakukan lebih buruk dibandingkan laki-laki dalam negosiasi.
- 4) Penggunaan taktik yang sama sering berujung pada hasil yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menggunakan taktik pertukaran sering tidak sukses laki-laki.
- 5) *Stereotyping* terhadap gender akan mempengaruhi performa negosiator dalam negosiasi. Umumnya, negosiator akan berlaku sesuai dengan stereotyping yang mereka percayai

Pihak pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik antara dusun ory, negeri pelauw dengan negeri kariuw. Pada saat pertemuan terpisah yang dilakukan di kedua negeri tersebut banyak sekali perempuan yang hadir menyampaikan aspirasi maupun melakukan negosiasi untuk mau berdamai tetapi dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Para perempuan baik dari Dusun Ory, Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw sepakat untuk berdamai karena konflik yang terjadi sangat merugikan mereka. Tetapi ada beberapa hal menjadi tuntutan perempuan dari Dusun Ory dan Negeri Pelauw kepada pemerintah yaitu pemerintah harus mengganti rugi segala kerusakan yang timbul akibat adanya konflik salah satunya mengganti tanaman cengkeh milik masyarakat Dusun Ory maupun Negeri Pelauw karena itu merupakan salah satu penghasilan mereka melalui berkebun.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat Dusun Ory:

"Sepanjang kita mengikuti proses-proses penyelesaian, disitu banyak Perempuan menyampaikan pandangan, adu argumen terkait dengan akar permasalahan konflik sampai pada tingkat penyelesaian konflik, jadi kita khusus untuk ory kita sudah teraviliasi di dalam sebuah konsep tuntutan secara umum dengan Masyarakat pelauw. Artinya ory sudah masuk di dalam beberapa point yang disampaikan kepada pemerintah. Misalnya penyelesaian sangketa ulayat, kemudian menuntut pemerintah menerbitkan SK terkait dengan batas wilayah yang sampai saat ini memang belum ada. Banyak dari Perempuan menuntut untuk ganti rugi tanaman cengkeh dan sudah terealisasi saat ini. Kesepakatan dari pihak ory untuk berdamai adalah sepanjang point-point tuntutan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah"

Wawancara lain dilakukan peneliti dengan bapak pejabat kepala pemerintahan negeri kariuw:

'Sangat ada peran perempuan, karena memang proses dialog awal kita pulang itu terjadi pada perempuan. Perempuan, mereka sangat berkeinginan untuk pulang ke kariuw, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang terjadi antara basudara pelauw yang memang punya hubungan emosional seperti mengerjakan pekerjaan tumbu batu di kali, mereka saling menelepon dan bertemu di tulehu untuk bertransaksi uang batu dari ibu-ibu yang menumbuk batu di kali mareke'e. Ibu-ibu dari pelauw yang berkomunikasi untuk mentransfer uangnya. Kemudian dari ibu guru SMA yang berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah SMA dan berbicara soal keinginan untuk bisa pulang. Jadi memang perempuan mempunyai peran dan dalam segala pertemuan harus melibatkan perempuan'.

Akan tetapi negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh para perempuan tersebut belum maksimal

sehingga konflik belum redam secara langsung tetapi bertahap dan masyarakat negeri kariu juga belum bisa balik ke kampung mereka tetapi harus ada upaya maksimal dari pihak pemerintah untuk mengembalikan mereka ke kampung halamannya.

Perempuan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik dusun ory, negeri pelauw dengan negeri kariu

Pelibatan dan peran perempuan dalam upaya mediasi konflik diharapkan konflik dapat cepat teratasi. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten adalah dalam bentuk mediasi terpisah dan juga mediasi secara bersamaan, dimana mediasi terpisah dilakukan pemerintah kabupaten dengan masing-masing negeri. Kemudian mediasi bersama dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi antara pemerintah dan juga beberapa perwakilan dari kedua negeri pada tanggal 14 November 2022 yang bertempat di Kantor Gubernur Maluku yang dihadiri oleh beberapa pihak dari kedua negeri tersebut.

Table 1 Pihak-pihak yang hadir pada Rekonsiliasi

No	Negeri Pelauw	Negeri Kariu
1	Raja Negeri Pelauw	Pj. Pemerintahan Negeri Kariu dan staf
2	Ketua Saniri Negeri Pelauw	Ketua Majelis Jemaat GPM Kariu
3	Staf Negeri Pelauw	Ketua Saniri Negeri Kariu dan anggota
4	Sekretaris Negeri Pelauw	Ketua Tim Penanggulangan Pengungsi Kariu dan anggota
5	Pemuda	Kepala Pemuda Kariu
6	Kepala Dusun Ory	Tokoh Masyarakat
7	Wakil Ketua Negeri Saniri	Ketua Pemaka (Masyarakat Kariu di Ambon)
8		Kepala Urusan Keuangan
9		Kepala Seksi Perencanaan
10		Guru SMA N 16 Maluku Tengah

Sumber : Sekretaris Negeri Pelauw dan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Kariu

Pada tahap rekonsiliasi konflik yang diselenggarakan pemerintah provinsi di kantor gubernur hanya ada 4 orang perempuan yang hadir dari 13 orang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sangat sedikit dalam proses penyelesaian konflik dengan cara formal.

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Penanganan Konflik Sosial dan Masalah Aktual: *'Tokoh perempuan sangat penting dilibatkan dalam mediasi seperti ini agar saling memahami kepedulian mereka dalam menyelesaikan sebuah konflik. Ada satu keterlibatan perempuan dalam mediasi konflik yaitu seorang tokoh agama, pendeta perempuan'*.

Walaupun kurang dilibatkan dalam penyelesaian konflik dengan cara yang formal tetapi perempuan baik dari dusun ory, negeri pelauw dan negeri kariu juga melakukan hal-hal yang dapat menyelesaikan konflik secara nonformal seperti menjalin komunikasi dengan melakukan transaksi uang dalam pekerjaan menumbuk batu antara ibu-ibu dari pelauw dengan ibu-ibu dari kariuw, kemudian

tetap menjalin komunikasi antara guru yang berasal dari negeri kariuw dan kepala sekolah yang berasal dari negeri pelauw. Selain itu peran langsung yang dilakukan para perempuan yaitu melarang suami, kakak, adik dan anaknya untuk tidak lagi terjun langsung ke medan konflik.

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan terkait dengan peran perempuan dalam penyelesaian konflik.

Wawancara lainnya, dilakukan peneliti yaitu dengan Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Kariu:

'Kita berbicara konflik ini ada banyak aspek. Satu diantaranya aspek ekonomi, aspek ekonomi ini mencakup semua kebutuhan primer yang memang semua orang menginginkan itu, dan karena itu bagaimana caranya tugas kita sebagai gereja ini dan juga terlepas dari tugas seorang perempuan adalah tetap memberikan edukasi bagaimana perempuan itu menopang ekonomi keluarga yang memang kondisinya itu tidak stabil, nah itu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya bukan hanya edukasi tetapi juga bagaimana pendampingan bagi para laki-laki dalam artian untuk mereka tidak cepat emosi dan terpancing amarah tetapi juga mereka bisa dikendalikan (hati seorang perempuan).'

Hal serupa juga dikatakan oleh seorang perempuan dari dusun ory:

'Kita para perempuan tidak berbuat banyak untuk penyelesaian konflik kemarin, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan para laki-laki untuk tidak lagi terpancing amarah dan tidak lagi terjun langsung ke medan peperangan karena rasa khawatir yang besar yang ada pada diri kami para perempuan.'

Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat dari Negeri Kariuw:

'Yang kami inginkan dari semua yang sudah terjadi adalah perdamaian, karena kita sudah hidup cukup lama di tanah ini. Khusus untuk perempuan yang diwakilkan oleh ibu pendeta sendiri menyerukan bahwa perempuan masyarakat kariu ingin berdamai dengan masyarakat ory dan pelauw.'

4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu peran Perempuan dalam penyelesaian konflik dusun ory, negeri pelauw dan negeri kariu. (1). Perempuan mempunyai kontribusi yang besar dalam memberikan bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologi (trauma healing) bagi kelompok yang rentan dari adanya konflik yang terjadi pada dusun ory, negeri pelauw dengan negeri kariu. Selain memberikan trauma healing banyak juga keterlibatan Perempuan dalam memberikan bantuan kepada para korban konflik. (2). Negosiasi yang dilakukan oleh para perempuan belum cukup maksimal, sehingga konflik belum redam secara langsung tetapi bertahap dan masyarakat negeri kariu juga belum bisa balik ke kampung mereka tetapi harus ada upaya maksimal dari pihak pemerintah untuk mengembalikan mereka ke kampung halamannya. (3). Keterlibatan perempuan sangat sedikit untuk penyelesaian konflik yang berifat formal, tetapi perempuan selalu berperan dalam penyelesaian konflik yang berifat nonformal.

Referensi

Abercrombie, N. S. (2010). *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Afif, A. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice, Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu & Upaya-upaya Melampauinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahdiah. (2013). Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat. *Academia*, 1807-1890.

- Alfarizi, M. K. (2022, Januari 26). Polisi Beberkan Kronologi Bentrokan di Pulau Haruku. *From nasional.tempo.com*.
- Antoso, A. (2022, Januari 26). Polda Maluku: Bentrok Antardesa di Pulau Haruku Gegara Batas Tanah. *news.detik.com*.
- Cohen, A. P. (1985). *The Symbolic Construction of Community*. London & New York: Routhled ge.
- Cohen, A. P. (1985). *The Symbolic Construction of Community*. London & New York: Roudhledge.
- Garna, J. K. (1992). *Teori-teori Perubahan sosial*. Bandung: Program Pasca Sarjana, Unpad.
- Gofanda, A. N., Khairunnisa, A., de Ftetes, J., & Kotaromalos, A. F. Konflik Wilayah Administrasi di Negeri Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagain Barat.
- H.C. Kelman, d. A. (2008). *Reconciliation From a Social-Psychological Perspective, The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*. New York: Oxford University Press.
- Heru Cahyono, M. W. (2008). *Konflik Kalbar dan Kalteng, Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haji, H. B. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 09-17.
- Hubeis, A. F. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press.
- Johnson, D. P. (1990). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kriesberg, L. (1998). *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution*. Lanham: Md: Rowman & Littlefield.
- Kurniaih, I. (2008). *Perempuan Pemicu Perang*. Yogyakarta : Pinus Book Publisher.
- Lesmana, A. S. (2022, Januari 26). Kerusakan Meledak di Pulau Haruku Maluku Tengah, Rumah-rumah Terbakar, Polisi Tertembak hingga Pipi Bolong. *suara.com*.
- Liliweri, A. (2014). *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Liliweri, A. (2014). *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradikma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Namakule, R. (2018). *Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Maluku*. Ambon.
- Pelu, A., Madubun, J., & Wance, M. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 124-139.
- Redaksi, T. (2022, Januari 27). Satlak PB Maluku Tengah Data Kerusakan Akibat Bentrok Warga. *voi.id*.
- Ritzer, G. d. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Ritzer, G. d. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Roger Fisher & William Ury, G. Y. (2011). *Negotiating an Agreement Without Giving in*. New York: Random House Business Books.
- Mirza Raisa Tuanaya, Mike Journida Rolobessy, Syaiful Rijal Mahulauw. (2024). Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Dusun Ory dan Negeri Kariu Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*. 3 (1).

- Ronald S. Kraybill, A. F. (2004). *Peace Skill, Panduan Mediator, Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ronald S. Kraybill, A. F. (2004). *Peace Skill, Panduan Mediator, Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Santoso, A. (2022, Januari 26). Polda Maluku: Bentrok Antardesa di Pulau Haruku Gegara Batas Tanah. *news.detik.com*.
- Sentiela Ocktaviana, W. (2014). Peran-peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 384-385.
- Soekanto, S. (1990). *1990. Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo .
- Sutriyanto, E. (2022, Januari 27). Kapolda Maluku Minta Warga Pelauw dan Kariuw Selesaikan Masalah Tapal Batas Secara Adat. *tribunnews.com*.
- Tuanaya, W., Khairunissa, A., & Wance, M. (2022). Institutional Studies Of Saniri Institutions In Negeri Of Hila And Mamala As Pillars Of Local Democracy In Central Maluku. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 2117-2124.
- Touwe, M. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram *Bagian Barat. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-15.
- Veegers, K. 1. (1993). *Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- voa.gov. (2022, November 18). Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.
- Wance, M. (2019). *Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 157-174.